



1\

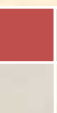
RENSTRA BAPPEDA & LITBANG TAHUN 2021 - 2026



Rencana Strategis

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

NOMOR : 23/Forum Renstra-PD/VIII/2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, “Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026” dapat selesai disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen Renstra merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan bagi Pemerintah Kabupaten Malinau secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian dengan adanya dokumen Renstra ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau secara terpadu dan berkelanjutan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan Tim Penyusun Dokumen Renstra Bappeda dan Litbang yang telah membantu memberikan saran-saran dan pendapat untuk penyusunan dokumen Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau, kami ucapkan terimakasih.

Akhir kata semoga Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini dapat memberikan data serta informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada khususnya, sehingga akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dapat di capai secara optimal dan terpadu dalam rangka memperoleh predikat akuntabilitas kinerja baik.

Malinau, 09 Agustus 2022

Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau

Drs. Agustinus, M.AP

NIP. NIP. 19670217 199312 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2. Sumber Daya Bappeda dan Litbang	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda dan Litbang.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang.....	30
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	36
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	38
3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis.....	40

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	43
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
	5.1. Strategi dan Kebijakan.....	47
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	50
BAB VII	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA DAN LITBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	58
BAB VIII	PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021	14
Tabel 2.2.	Data Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021.....	15
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	17
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda dan Litbang Tahun 2017-2021.....	28
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	31
Tabel 3.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.....	33
Tabel 3.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau yang terkait dengan tugas pokok Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.....	34
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau.....	35
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau 2021-2026	44
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda dan Litbang.....	44
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	49
Tabel 6.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Malinau.....	51

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026	59
-----------	--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau	12
Gambar 2.2.	Jumlah ASN dan Non ASN di Lingkungan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021.....	13
Gambar 2.3.	Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021.....	14

DAFTAR LAMPIRAN

Bagan 3.1	Pohon Masalah.....	42
Bagan 4.1	Pohon Tujuan.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Malinau selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malinau yang Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan”** Pernyataan visi tersebut merupakan suatu pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Bappeda dan Litbang (OPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra-OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-OPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Berkaitan itu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Organisasi Bappeda dan Litbang (OPD) harus menyusun Rencana Strategis OPD yang berisikan program dan kegiatan indikatif OPD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam Renstra OPD harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian Renstra OPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) OPD adalah dokumen perencanaan teknis operasional OPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Bappeda dan Litbang (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Dokumen Renstra OPD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Selain itu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat Bappeda dan Litbang lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Malinau sesuai tugas dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah perlu menyusun suatu rencana strategik agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya perubahan Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum terdapat tiga perubahan lingkungan strategis yang harus dihadapi selama ini dan masa yang akan datang yaitu demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi. Demokratisasi : yang menuntut adanya partisipasi yang luas dari masyarakat dalam kegiatan perencanaan di lingkungannya; Desentralisasi : yang menuntut adanya ruang gerak yang memadai bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; Globalisasi : yang telah membuka akses teknologi dan arus informasi sehingga nilai-nilai sosial budaya yang baru dapat mempengaruhi sistem nilai yang telah berkembang di masyarakat.

Dalam menanggapi perubahan lingkungan dan perkembangan pemerintahan yang semakin kompleks, Bappeda dan Litbang dituntut dapat melaksanakan reorientasi, restrukturisasi, dan revitalisasi manajemen kerja, agar



lebih efektif, efisien, dan profesional. Pada saatnya diharapkan dinamika kelembagaan Bappeda dan Litbang dapat mengimbangi berbagai tantangan dan tuntutan di masa depan yang semakin kompleks, yang ditandai dengan perubahan kondisi masyarakat yang semakin transparan. Adanya kejelasan visi, misi dan strategi organisasi Bappeda dan Litbang di masa depan akan memudahkan Bappeda dan Litbang melaksanakan kegiatannya dalam merumuskan berbagai program dan kegiatan perencanaan. Dalam memberikan makna terhadap eksistensi kelembagaan, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) yang lebih jelas dan terarah sebagai penentu arah bagi seluruh aktifitas organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Bappeda dan Litbang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dokumen Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh komponen/aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bappeda dan Litbang dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah.
3. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Tujuan umum dari penyusunan dokumen Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang.



3. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau khususnya bidang perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumber Daya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda dan Litbang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda dan Litbang

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 27 Tahun 1980 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang data, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, prasarana dan pengembangan wilayah, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan, pembiayaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda dan Litbang mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

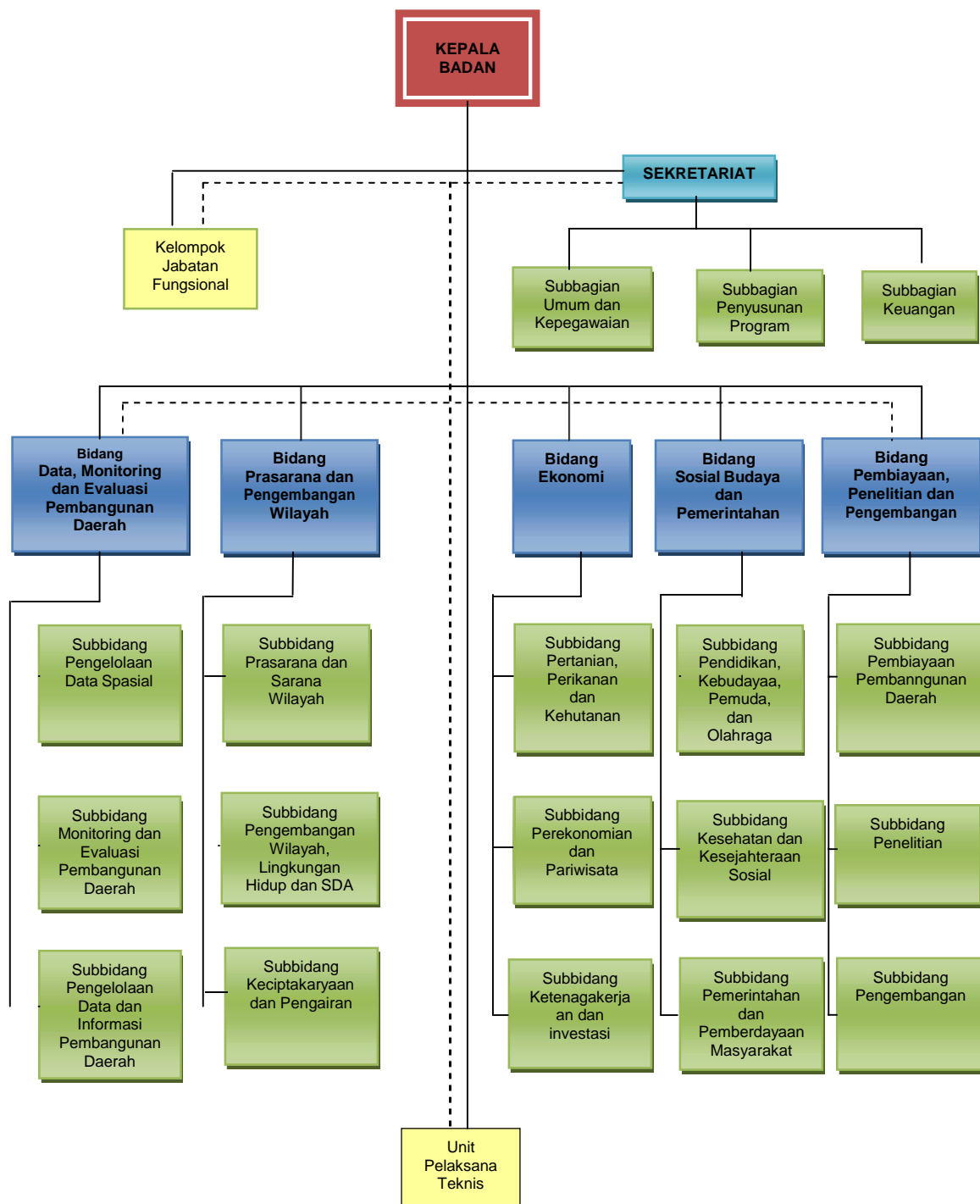


Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda dan Litbang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 1. Subbidang Pengelolaan Data Spasial;
 2. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
 3. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- d. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 1. Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 2. Subbidang Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
 3. Subbidang Keciaptakaryaan dan Pengairan.
- e. Bidang Ekonomi;
 1. Subbidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 2. Subbidang Perekonomian dan Pariwisata;
 3. Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi.
- f. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 1. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 3. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- g. Bidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan;
 1. Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah;
 2. Subbidang Penelitian;
 3. Subbidang Pengembangan.



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau



————— : Garis Komando
————— : Garis Koordinasi
- - - - -



2.2 Sumber Daya Bappeda dan Litbang

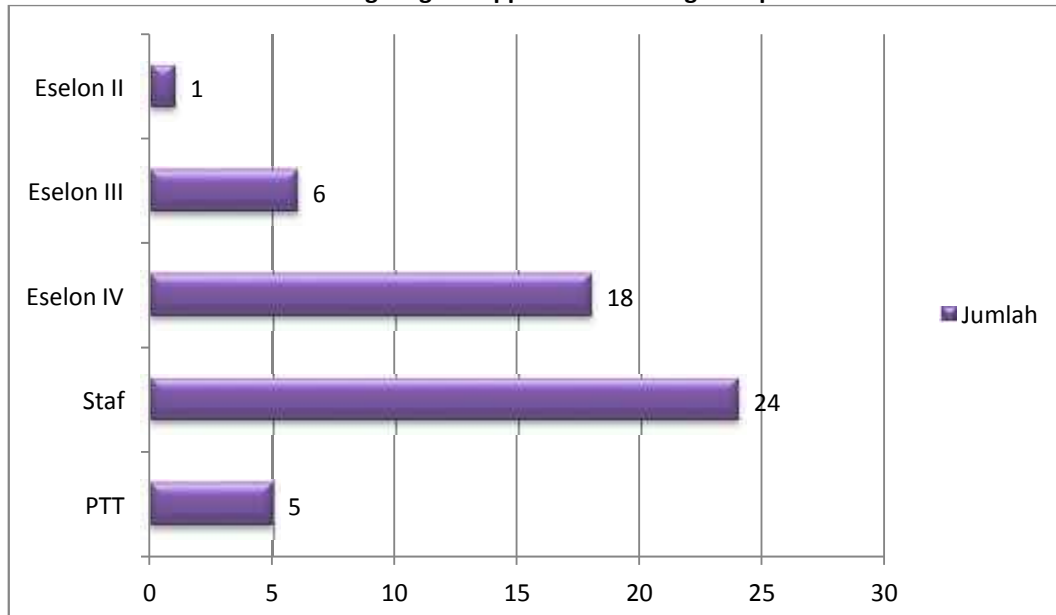
Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada tahun 2021 sebanyak 54 orang PNS. Dari jumlah 54 orang tersebut terdiri dari 25 orang pejabat struktural, dan pelaksana sebanyak 24 orang sedangkan tenaga kontrak berjumlah 5 orang dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu/pendidikan. Berikut data mengenai sumber daya aparatur/pegawai yang berada di lingkungan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau berdasarkan jabatan, pendidikan pangkat dan golongan.

Berikut ini jumlah ASN dan Non ASN Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau:

Gambar 2.2.
Jumlah ASN dan Non ASN di Lingkungan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021

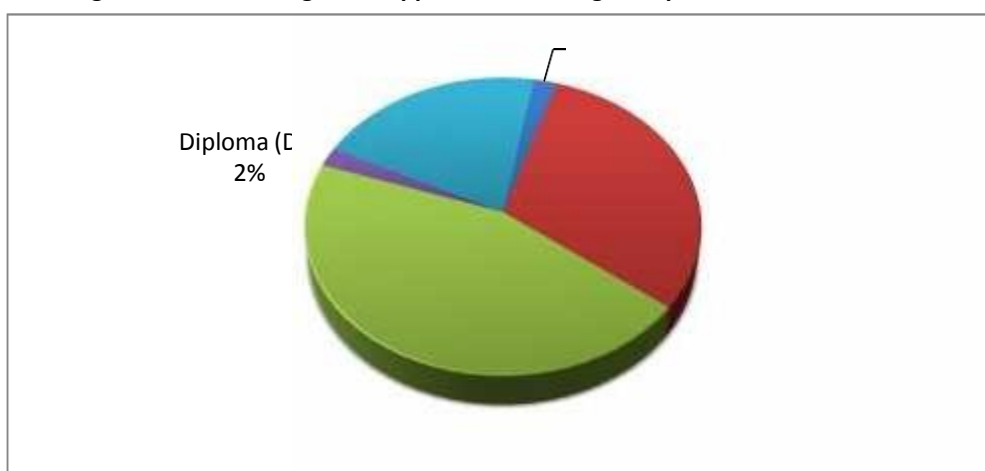




a. Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan maka sumber daya aparatur yang ada di Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dengan jumlah 54 orang tersebut yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan S3. Berikut personil Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau sesuai dengan tingkat pendidikan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.3.
Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021



b. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau terbanyak adalah golongan III/a, secara lengkap komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi PNS berdasarkan pangkat dan golongan Tahun 2021

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Muda	IV/c	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	9
4	Penata Tingkat I	III/d	8
5	Penata	III/c	8
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
7	Penata Muda	III/a	9
8	Pengatur Tingkat I	II/d	7
9	Pengatur	II/c	3
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
JUMLAH			49

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang



2.2.2 Perlengkapan/Sarana dan Prasarana

Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi.

Tabel 2.2.

Data Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2021

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
SARANA DAN PRASARANA			
1.	Jeep	1 Unit	baik
2.	Sepeda Motor	8 Unit	baik
3.	Global Positioning System	3 Unit	baik
4.	Pianimeter	1 Unit	baik
5.	Air Conditioning System	6 Unit	baik
6.	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1 Unit	baik
7.	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa double folio	1 Unit	baik
8.	Rak Besi/Metal	1 Unit	baik
9.	Filing Besi/Metal	1 Unit	baik
10.	Brand Kas	2 Unit	baik
11.	Lemari Sorok	3 Unit	baik
12.	Lemari Kaca	2 Unit	baik
13.	Perkakas Kantor	1 Unit	baik
14.	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	baik
15.	Papan Tulis	2 Unit	baik
16.	Mesin Absensi	1 Unit	baik
17.	Alat Pemotong Kertas	1 Unit	baik
18.	Overhead Projektor	1 Unit	baik
19.	White Board Elektronik	1 Unit	baik
20.	Alat Kantor Lainnya	1 Unit	baik
21.	Lemari Kayu	4 Unit	baik
22.	Meja Rapat	1 Unit	baik
23.	Meja Biro	4 Unit	baik
24.	Kursi Plastik	30 Unit	baik
25.	Lemari Es	1 Unit	baik
26.	AC Unit	6 Unit	baik
27.	AC Split	8 Unit	baik
28.	Camera Digital	2 Unit	baik
29.	Dispenser	1 Unit	baik
30.	Handy Cam	1 Unit	baik
31.	Local Area Network (LAN)	1 Unit	baik
32.	PC Unit	14 Unit	baik
33.	Laptop	11 Unit	baik



NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
34.	Hard Disk	2 Unit	baik
35.	Printer (Peralatan Mini Komputer)	4 Unit	baik
36.	CPU	2 Unit	baik
37.	Monitor	2 Unit	baik
38.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18 Unit	baik
39.	Server	1 Unit	baik
40.	Laptop	1 Unit	baik
41.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	33 Unit	baik
42.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3 Unit	baik
43.	Lemari Buku Untuk Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1 Unit	baik
44.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	10 Unit	baik
45.	UPS	5 Unit	baik
46.	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Drone,Tab,Hardisc Eksternal,Remote Kontrol)	1 Unit	baik
47.	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain (Bagian dari Drone Antena Boster)	1 Unit	baik
48.	Telephone (PABX)	1 Unit	baik
49.	Pesawat Telephone	1 Unit	baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3



Tabel 2.3. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN																		
I	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi																		
1	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		9 Jenis		3	3	-	-	3	3	3	-	-	3	100	100	-	-	100
2	Jumlah ATK yang tersedia		155 Jenis		31	33	17	33	41	31	33	17	33	41	100	100	100	100	100
3	Jumlah barang cetak dan foto copy		8 Jenis		2	2	2	-	2	2	2	2	-	2	100	100	100	-	100
4	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		8 Jenis		-	4	2	-	2	-	4	2	-	2	100	100	100	-	100
5	Jumlah kotak makanan rapat		2962 Kotak		270	205	770	210	1507	270	205	770	210	900	100	100	100	100	60
6	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti		110 Kali		30	15	25	20	20	20	15	25	20	6	100	100	100	100	30
7	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		64 Kali		-	-	30	4	30	-	-	30	4	-	-	-	100	100	-
8	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		56 Org		-	-	-	-	56	-	-	-	-	56	-	-	-	-	100
9	Jumlah periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN		24 Bulan		-	-	-	-	12	12	-	-	12	12	-	-	-	100	100



Tabel 2.3. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
II	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur																		
10	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		38 Unit		8	8	8	8	8	6	8	8	8	6	75	100	100	100	100
III	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses																		
11	Jumlah buku profil daerah		135 Buku		25	20	35	35	20	25	20	35	35	20	100	100	100	100	100
12	Jumlah buku LKPJ Bupati Malinau tahunan		270 Buku		60	60	50	50	50	60	60	50	50	50	100	100	100	100	100
13	Jumlah buku LKPJ akhir masa jabatan		50 Buku		-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100
14	Jumlah buku profil daerah		91 Buku		1	35	35	35	20	1	35	35	35	20	100	100	100	100	100
15	Jumlah unit yang di upgrade		1 Unit		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-
16	Jumlah buku data pembangunan daerah		20 Buku		20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	100	-	-	-	-
17	Jumlah peta yang di cetak		-		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-
IV	Persentase data perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar																		



Tabel 2.3. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
18	Jumlah dokumen study kelayakan dan masterplan Kota Mandiri Kabupaten Malinau		1 Dok		-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-
19	Jumlah dokumen study kelayakan Ibu Kota Malinau menjadi Kota Mandiri		1 Dok		-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-
20	Jumlah updating dokumen RPIJM keciptakaryaan		1 Dok		-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-
21	Jumlah dokumen masterplan Ibu Kota Malinau menjadi Kota Mandiri		1 Dok		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-
22	Jumlah dokumen sistem informasi perencanaan pembangunan jaringan jalan Kabupaten Malinau		1 Dok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Jumlah Dokumen Kajian Koefisien Wilayah Terbangun di Kab. Malinau		1 Dok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Jumlah Dokumen KLHS Ibu Kota Malinau Menjadi Kota Mandiri		1 Dok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan Kabupaten		1 Dok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tabel 2.3. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Malinau																		
26	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten Malinau		1 Dok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Jumlah dokumen masterplan telekomunikasi Malinau		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Jumlah koordinasi, konsultasi perencanaan bidang prasarana dan pengembangan Wilayah yang diikuti		55 Kali		-	-	5	25	25	-	-	5	25	25	-	-	100	100	100
V	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah																		
29	Jumlah dokumen koordinasi kegiatan Tim Koordinasi Kabupaten dan TIM Distric Proje Management Unit (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat		1 Dok		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-
30	Jumlah Koordinasi Strategi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan		3 Kali		-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100	-	-	-



**Tabel 2.3. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau**

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	(SPP/PP/PPK)																		
31	Jumlah Dokumen Moda Transportasi		1 Dok		-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-
VI	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan realisasi tahunan																		
32	Jumlah kegiatan konsultasi publik		1 keg		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
33	Jumlah kegiatan koordinasi Forum SKPD/Lintas SKPD		1 keg		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
34	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan		2080 Orang/Peserta		400	420	420	420	420	400	420	420	420	420	100	100	100	100	100
35	Jumlah dokumen KUA, PPAS-Perubahan dan KUA, PPAS		20 Dok		4	4	4	4	-	4	4	4	4	-	100	100	100	100	
36	Jumlah rapat koordinasi Bappeda dan Litbang Se-Provinsi Kalimantan Utara yang diikuti		3 Kali		1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	100	100	100	-	-
37	Jumlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		10 DoK		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
38	Jumlah dokumen kegiatan APBN dan bantuan keuangan		1 Dok		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-



Tabel 2.3. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	provinsi																		
39	Jumlah Dokumen Kegiatan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan TEPR		1 Dok		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-
40	Jumlah dokumen monev		1 Dok		-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-
41	Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang di evaluasi (RENSTRA, RKPD, RENJA)		1 Dok		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-
42	Jumlah dokumen kelembagaan tentang CSR		1 Dok		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-
43	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1 Apk		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-
44	Jumlah dokumen untuk lampiran PPAS dan RKPD		4 Dok		-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	100	100	-
45	Jumlah dokumen kajian kebutuhan buku wajib belajar jenjang PAUD, SD, SMP di Kabupaten Malinau		1 Dok		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-
46	Jumlah dokumen RPJMD perubahan		1 Dok		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-
47	Jumlah Dokumen RPJMD		1 Dok		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-
48	Jumlah dokumen kajian optimalisasi dana transfer daerah		1 Dok		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-



Tabel 2.3. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
49	Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan usulan inovasi daerah		2 dok		1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	100	-	100	-	100
50	Jumlah layanan jaringan internet		12 mbps		3	-	3	3	3	3	-	3	3	3	100	-	100	100	100
51	Jumlah dokumen teknokratik RPJMD		1 Dok		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-
52	Jumlah dokumen KLHS RPJMD		1 Dok		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-
53	Jumlah kegiatan konsultasi publik		1 Keg		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100	-	-	-	100
54	Jumlah kegiatan koordinasi Forum SKPD/Lintas SKPD		1 Keg		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100	-	-	-	100
55	Jumlah Dokumen RPJMD		1 Dok		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100	-	-	-	100
VII	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi																		
56	Jumlah Dokumen Kemakmuran Hijau		1 Dok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Jumlah Dokumen Monitoring Kemakmuran Hijau		1 Dok		-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100	-	-	-
58	Jumlah Pendampingan Kemakmuran Hijau		2 Kali		-	2 Kali	-	-	-	-	2 Kali	-	-	-	-	100	-	-	-
59	Jumlah Pendampingan		4 Kali		-	2 Kali	-	2 Kali	-	-	2 Kali	-	2 Kali	-	-	100	-	100	-



Tabel 2.3. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Kegiatan HOB (Heart Of Borneo)																		
60	Jumlah Dokumen DP3K TNKM		1 Dok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Jumlah Koordinasi & Konsultasi DP3K TNKM		4 Kali		-	4 Kali	-	-	-	-	4 Kali	-	-	-	-	100	-	-	-
62	Jumlah Laporan Kegiatan DP3K TNKM		1 Lap		-	1 Lap	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	-	100	-	-	-
63	Jumlah Dokumen Evaluasi Dana Gerdema dan RT Bersih		1 Dok		-	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100	-	-
64	Jumlah Dokumen Kegiatan DP3K TNKM		1 Dok		-	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100	-	-
65	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ekonomi		9 Kali		20 Kali	-	12 Kali	12 Kali	20 Kali	20 Kali	-	12 Kali	12 Kali	20 Kali	100	-	100	100	100
66	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian		8 Dok		-	-	-	-	8 Dok	-	-	-	-	8 Dok	-	-	-	-	100
67	Jumlah Dokumen Kajian		1 Dok		-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Ikan Air Tawar		1 Dok		-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Jumlah lomba stand irau		1 Keg		-	-	-	1 Keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana Jangka Menengah Daerah dengan realisasi																		



Tabel 2.3. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	tahunan di bidang sosial dan budaya																		
70	Jumlah Dokumen Analisis Kemiskinan di Kabupaten Malinau		1 Dok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Jumlah Dokumen Fasilitasi TKPK		1 Dok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Jumlah Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah		5 Lap		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	100	100	100	100	100
73	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah		2 Dok		-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	100	-	-	-	-
74	Jumlah Laporan RAD-PPK Kabupaten Malinau		2 Lap		-	1 Lap	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	100	-	-	-	-
75	Jumlah Laporan TPB/SDGs		3 Lap		1 Lap	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	-	1 Lap	1 Lap	100		100	100	100	100
76	Tersedianya Kawasan Tanpa Rokok (KTR)		1 Dok		-	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100	-	-
77	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Identifikasi Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Sosial		1 Lap		1 Lap	-	-	-	1 Lap	1 Lap	-	-	-	1 Lap	100	-	-	-	100



**Tabel 2.3. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau**

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
78	Jumlah Laporan Monitoring Stunting di Kabupaten Malinau		2 Dok		1 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok	100	-	-	100	100
79	Jumlah Laporan RAD-TB Kabupaten Malinau		2 Lap		1 Lap	-	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	-	-	1 Lap	1 Lap	100	-	-	100	100
80	Jumlah Koordinasi, Konsultasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya yang diikuti		64 kali		19 kali	-	25 kali	25 kali	19 kali	19 kali	-	25 kali	25 kali	19 kali	100	-	100	100	100
81	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia		8 Dok		8 Dok	-	-	-	8 Dok	8 Dok	-	-	-	8 Dok	100	-	-	-	100
82	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan		34 Dok		-	-	-	-	34 Dok	-	-	-	-	34 Dok	-	-	-	-	100
IX	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dalam pembangunan																		
83	Jumlah Dokumen Program Unggulan Daerah (2016)		1 Dok		1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100	-	-	-	-
84	Jumlah jenis sarana kantor LP3MD		2 Jenis		2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	-	-	-	-	100	-	-	-	-
85	Jumlah pakaian harian dan perlengkapan untuk LP3MD		65 Stel		65 Stel	-	-	-	-	65 Stel	-	-	-	-	100	-	-	-	-



Tabel 2.3. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
X	Persentase perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam																		
86	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian		1 Dok		-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100	-	-	
87	Jumlah Dokumen Rencana Induk Kawasan Perbatasan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
88	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur		6 Dok		-	-	-	-	6 Dok	-	-	-	-	6 Dok	-	-	-	100	
XI	Persentase pelanggaran tata ruang																		
XII	Persentase Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah																		
89	Jumlah Laporan Evaluasi Renstra dan RPJMD 2016 s/d 2021		1 Lap		-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	100	
90	Jumlah Laporan Evaluasi RENJA Perangkat Daerah		2 Lap		-	-	-	1 Lap	1 Lap	-	-	-	1 Lap	1 Lap	-	-	-	100	
91	Jumlah Laporan Evaluasi Dana Gerdema dan RT Bersih		2 Lap		-	-	-	1 Lap	-	-	-	-	1 Lap	-	-	-	-	100	
92	Jumlah Laporan Kegiatan Monev, DAK,		2 Lap		-	-	-	1 Lap	1 Lap	-	-	-	1 Lap	1 Lap	-	-	-	100	



Tabel 2.3. (T-C.23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Bankeu dan TEPR																		

Tabel 2.4. (T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Tahun Kabupaten Malinau

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN																	
BELANJA	13.866.577.991,00	16.441.109.881,53	15.787.541.105,20	12.158.869.198,87	13.181.714.335,00	12.551.570.212,00	15.117.575.690,00	14.878.042.119,00	11.420.084.790,00	12.545.531.981,00	90,52	91,95	94,24	93,92	95,17	0,00	1,37
1. Belanja Langsung	4.447.712.650,00	6.883.738.468,00	6.162.353.581,00	3.094.131.670,98	3.643.912.773,00	3.899.282.723,00	5.933.195.621,00	5.741.787.706,00	2.588.346.293,00	3.260.907.192,00	87,67	86,19	93,18	83,65	89,49	3,07	5,00
2. Belanja Tidak Langsung	9.418.865.341,00	9.557.371.412,53	9.625.187.524,20	9.064.737.527,80	9.537.801.562,00	8.652.287.489,00	9.184.380.069,00	9.136.254.413,00	8.831.738.497,00	9.284.624.789,00	91,86	96,10	94,92	97,43	97,35	0,39	1,86
Total Anggaran	13.866.577.991,00	16.441.109.880,53	15.787.541.105,20	12.158.869.198,78	13.181.714.335,00	12.551.570.212,00	15.117.575.690,00	14.878.042.119,00	11.420.084.790,00	12.545.531.981,00	90,52	91,95	94,24	93,92	95,17	0,00	1,37



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda dan Litbang

Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda dan Litbang memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi Bappeda dan Litbang dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

1. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;
3. Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dan Litbang dalam melaksanakan tugasnya adalah:

1. Keterpaduan perencanaan antar Kabupaten/Kota;
2. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan;

Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga sangat menunjang dalam penyusunan produk-produk perencanaan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis organisasi perangkat daerah adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan program kegiatan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Kondisi yang dimaksud adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan, maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa 5 (lima) tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan analisis gambaran umum Bappeda dan Litbang, maka dirumuskan permasalahan pembangunan Jangka Menengah Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yaitu:

1. Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Belum dijadikan Bahan Pertimbangan Kebijakan Perencanaan Berikutnya
3. Belum Optimalnya Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

Dari hasil analisis capaian kinerja disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang adalah **Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pembangunan Daerah**. Keterkaitan antara masalah pokok dan akar masalah dalam pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
Belum optimalnya Implementasi perencanaan pembangunan daerah	Kurang optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Masih terdapatnya kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mengungkit kinerja perangkat daerah2. Ketersediaan dan keakuratan data perencanaan belum memadai3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang urusan dan sub bidang urusan4. Kurang tersedianya data dan informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan
	Kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Masih terbatasnya hasil monitoring program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijadikan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan2. Pelaksanaan kegiatan monitoring program, kegiatan dan sub kegiatan belum optimal3. Kurang tersedianya data dan informasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan PD yang terupdate
Belum optimalnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Kualitas inovasi daerah belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Masih terbatasnya inovasi daerah yang masuk nominasi tingkat nasional2. Masih terbatasnya pembinaan dan pengembangan inovasi daerah3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia pada perangkat daerah
	Kualitas penelitian dan pengembangan belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Masih terbatasnya jumlah pelaksanaan penelitian dan pengembangan2. Masih rendahnya minat pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan3. Masih rendahnya sumber daya peneliti



3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi sebagai rumusan umum yang menggambarkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;** melalui upaya menciptakan sumber daya manusia sehat dan cerdas serta tenaga kerja terampil yang menguasai dan mampu menerapkan IPTEK, berkecukupan pangan, suasana kehidupan yang kondusif aman, tenteram, harmonis dan bebas bencana, tidak terjadi diskriminasi, pemberdayaan perempuan dan anak, serta bebas konflik dengan karakter dan budaya masyarakat yang kuat.
2. **Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal;** melalui upaya pembangunan perekonomian domestik berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi, penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan usaha dengan membuka peluang investasi dibidang pertanian dalam arti luas, industri, jasa perdagangan dan pariwisata, ekonomi kreatif , serta memperkuat koperasi dan UMKM.
3. **Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;** membangun dan mengembangkan infrastruktur ekonomi, sistem transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan pemukiman, teknologi komunikasi dan informasi, serta menciptakan lingkungan hidup yang



berkualitas.

4. **Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan;** melalui implementasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, yakni pemerintahan daerah yang profesional, bertanggung jawab, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan pemerintahan dimana dalam menjalankan kebijakan, program dan sistemnya dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat.

Berdasarkan telaahan visi dan misi Buapti dan Wakil Bupati terpilih Maka Bappeda dan Litbang secara umum berkontribusi terhadap pencapaian Misi keempat yaitu: **“Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”**.

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran yang merupakan telaahan bagi Bappeda dan Litbang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

VISI	: Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional		
Misi Keempat	: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (good governance)	Indeks RB	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat SAKIP

Dalam rangka lebih memfokuskan program-program pembangunan, dilakukan melalui pendekatan program inovasi daerah. Hal ini dimaksudkan agar visi **“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional”** dapat direalisasikan sesuai harapan masyarakat Malinau. Program-program inovasi daerah tersebut terdiri atas 5



(lima) program, yaitu:

1. Program Desa Sarjana
2. Program Milenial Mandiri
3. Program Rasda Plus
4. Program RT Bersih
5. Program Wajib Belajar Malinau Maju

Berdasarkan uraian tersebut, Bappeda dan Litbang Malinau sesuai dengan tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, dengan tujuan yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (good governance). Adapun sasaran dari Misi ke-4 yang terkait dengan tugas pokok Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dengan indikator sasaran yaitu Predikat SAKIP.

Visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau yang terkait dengan tugas pokok Bappeda dan Litbang Malinau disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau yang terkait dengan tugas pokok Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

Tugas Pokok Bappeda dan Litbang	Visi RPJMD	Misi Ke-4	Tujuan	Sasaran	Indikator
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang data, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, prasarana dan pengembangan wilayah, ekonomi, sosial	Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional	Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (good governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat SAKIP



Tugas Pokok Bappeda dan Litbang	Visi RPJMD	Misi Ke-4	Tujuan	Sasaran	Indikator
budaya dan pemerintahan, pembiayaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten					

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda dan litbang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda dan Litbang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau

Visi :	Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional			
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi ke-4: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Program : 1. Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Program koordinasi dan	Belum Primanya Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Sudah adanya koordinasi yang baik di tingkat RT, Desa dan Kecamatan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang RT,



Visi :	Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional			
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3. Program penelitian dan pengembangan daerah			Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Analisis Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara terhadap sasaran dan kebijakan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 Terdapat tiga tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di Tahun 2020-2024, dirumuskan Sasaran Strategis disertai dengan Indikator Sasaran yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas, untuk lima tahun ke depan yaitu:

1. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama:



Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, yang diukur dari indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Sasaran Strategis dari tujuan kedua:

Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner, yang diukur dari indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L dan Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.

3. Sasaran Strategis untuk Tujuan Ketiga:

Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM, yang diukur dari indikator:

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
- Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan rencana strategis Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 terdapat satu tujuan utama Bappeda dan Litbang Kalimantan Utara yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif.

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara di Tahun 2021-2026, dirumuskan Sasaran Strategis disertai dengan Indikator Sasaran yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, untuk lima tahun ke depan yaitu:

1. Sasaran Strategis Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara:
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan profesional, efisien,



efektif, dan fokus pada sistem penganggaran berbasis kinerja, yang diukur dari indikator Predikat SAKIP.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau 2021-2026 maka dokumen tersebut menjadi dokumen yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dikordinasikan oleh Bappeda dan Litbang. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan rencana penataan ruang wilayah di Kabupaten Malinau, berdasarkan struktur ruang dan pola ruang wilayah.

Dengan mempertimbangkan sinergi rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta mengantisipasi pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan yang diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan di wilayah timur, maka arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Malinau periode tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis yang merupakan kawasan yang diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting di lingkup nasional, provinsi dan kabupaten. Kawasan strategis tersebut di Kabupaten Malinau terdiri atas:

1. Kawasan Strategis Nasional, yang terdiri atas: (1) kawasan perbatasan darat RI dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur); dan (2) kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo).
2. Kawasan Strategis Provinsi, yang ada di Kabupaten Malinau adalah Long Nawang dan kawasan sekitarnya yang akan dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal perbatasan dan pedalaman.
3. Kawasan Strategis Kabupaten, yang terdiri atas: (1) kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan ekonomi (Perkotaan Malinau, Long Nawang, Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Mentarang); (2) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan sosial budaya (pusat pemerintahan



Kabupaten Malinau, kawasan warisan budaya di Kecamatan Bahau Hulu, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Sungai Boh); (3) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam (pertambangan batubara di Kecamatan Malinau Selatan); dan (4) Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (Taman Nasional Kayan Mentarang).

Selain itu, arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Malinau diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah desa dan wilayah kecamatan.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Desa/Kelurahan

Dengan memperhatikan program-program yang dicanangkan, meliputi Program Desa Sarjana, Program Milenial Mandiri, Program Rasda PLUS, Program RT Bersih dan Program WM Malinau Maju, maka strategi pembangunan wilayah desa di Kabupaten Malinau secara umum adalah “peningkatan kemandirian, kedamaian dan kesejahteraan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di desa”. Strategi umum tersebut dijabarkan dalam strategi khusus sebagai berikut; (1) pengembangan potensi dan karakteristik keunggulan desa/kelurahan; (2) peningkatan ketahanan pangan; (3) peningkatan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim; (4) peningkatan kewirausahaan desa; dan (5) peningkatan konektivitas desa.

Arah kebijakan pembangunan wilayah desa/kelurahan antara lain adalah: (1) meningkatkan kapasitas aparat desa; (2) mengembangkan SDM sesuai kebutuhan desa; (3) meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui pemberdayaan masyarakat (pendampingan, pembinaan, penyuluhan, pelatihan, kursus, magang); (4) meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi bencana; (5) membangun sarana prasarana dasar dan ekonomi, (6) mengembangkan ekonomi kreatif berbasis potensi dan kearifan lokal pedesaan.



2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kecamatan

Strategi pembangunan wilayah kecamatan meliputi: (1) pengembangan kawasan strategis pusat pengembangan kegiatan lokal yang unggul dan berdaya saing; (2) peningkatan koordinasi pembangunan wilayah desa/kelurahan; (3) peningkatan ketahanan pangan; (4) pengembangan inovasi dan keunggulan kecamatan; (5) peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta (6) peningkatan konektivitas antar desa dan antar kecamatan. Oleh karenanya, arah kebijakan pembangunan wilayah kecamatan antara lain: (1) meningkatkan kapasitas aparat kecamatan; (2) membangun dan mengembangkan prasarana kewilayahan; (3) membangun dan mengembangkan prasarana dasar; (4) membangun dan mengembangkan prasarana ekonomi; (5) mengembangkan ekonomi kreatif berbasis keunggulan desa; (6) memperluas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan.

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan penelaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2021-2026 maka dokumen tersebut menjadi dokumen yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dikordinasikan oleh Bappeda dan Litbang. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Malinau.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.



Berdasarkan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 Perumusan Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Malinau yaitu **“Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Kabupaten Malinau”** yang disebabkan oleh karena **“Belum Primanya Tata Kelola Pemerintahan”** dan mengakibatkan **“Keuangan Daerah yang Belum Efisien/Efektif”** maka pelayanan dan analisis isu strategis tersebut menjadi dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah di masa datang. Karena itu, dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal.

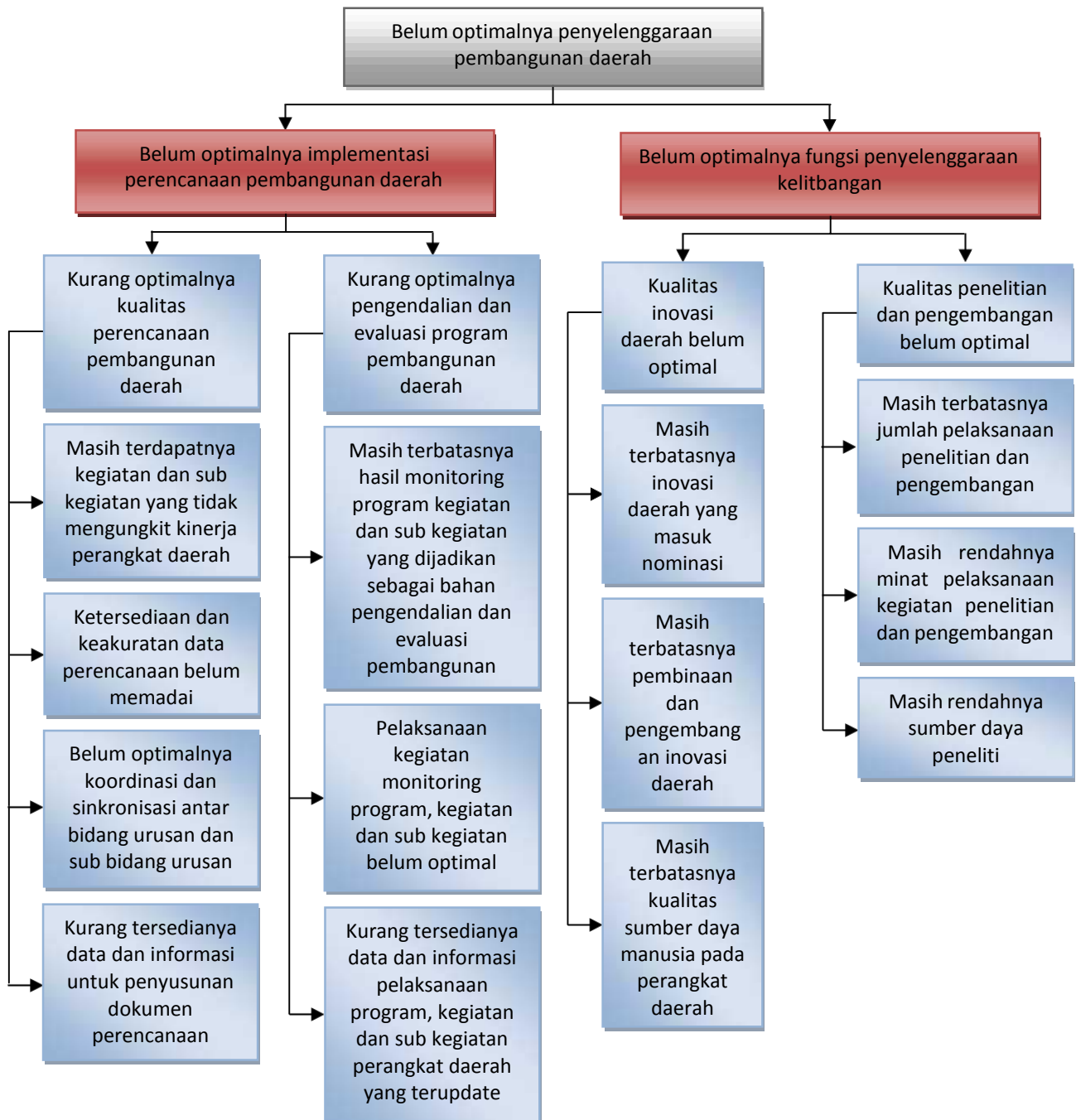
Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara serta telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Malinau dan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau sebagai berikut:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan yang konsisten
- b. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah
- c. Peningkatan kualitas inovasi daerah
- d. Implementasi rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan



Bagan 3.1

Pohon Masalah





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung pada tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang, serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka tujuan tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran beserta indikator sasaran.

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka keterkaitan rumusan tujuan, sasaran dan indikator dirumuskan sebagai berikut:



Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Perencanaan Kinerja AKIP	30	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase capaian indicator kinerja kabupaten	80%	85%	90%	95%	100%
			Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbang	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	80%	85%	90%	95%	100%
				Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	80%	85%	90%	95%	100%

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda dan Litbang

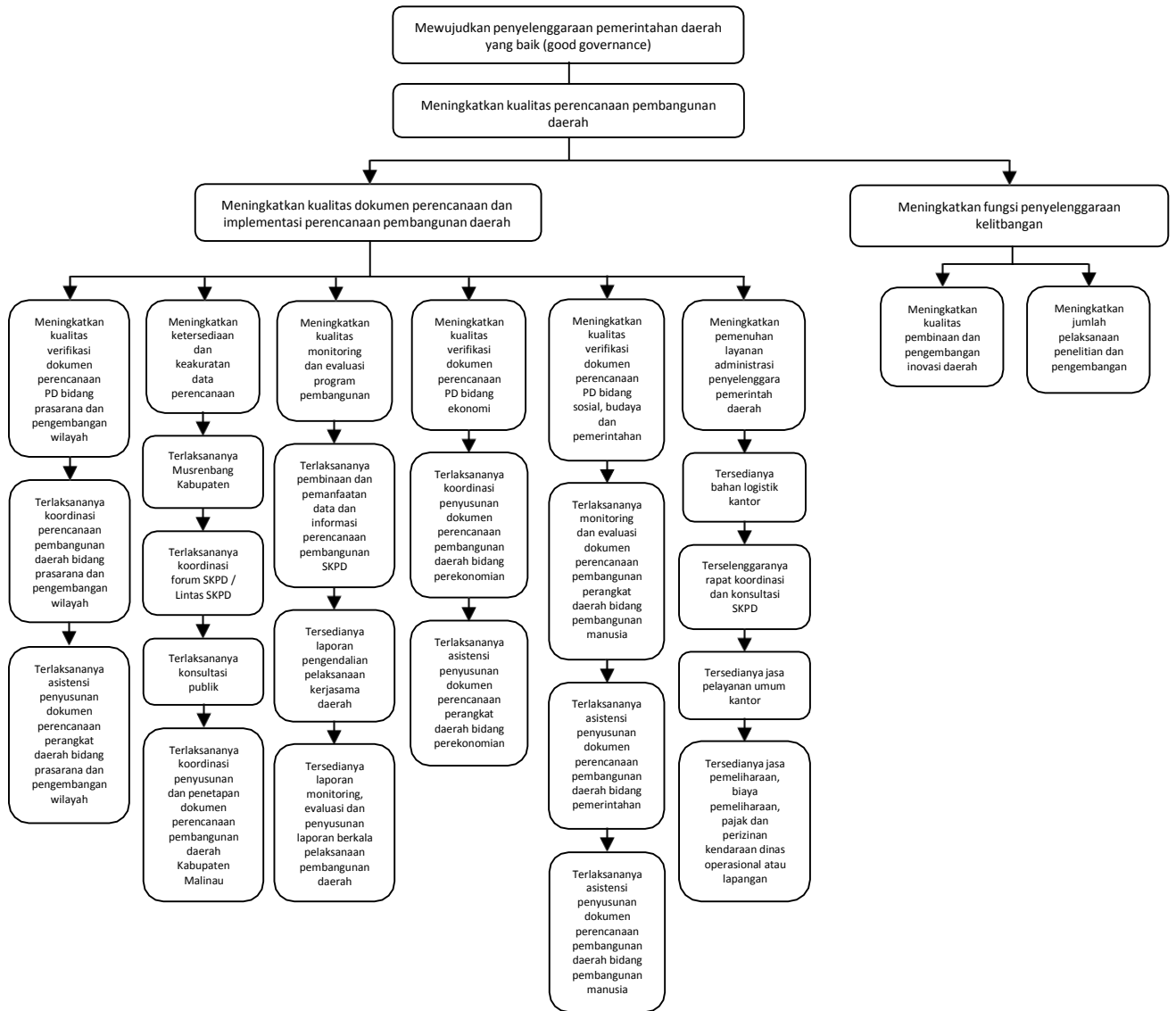
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Data	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	5	6	7	8
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Perencanaan Kinerja AKIP	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RKPD kedalam RPJMD tahun berkenaan	$\frac{\text{Jumlah program dalam RKPD}}{\text{Jumlah program dalam RPJMD}} \times 100\%$	Bidang Litbang, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Bidang PPW, Bidang Data dan Informasi dan Sekretariat Bappeda dan Litbang	Bappeda dan Litbang
			Persentase capaian indicator kinerja Kabupaten	$\frac{\text{Persentase sasaran kinerja dengan capaian 100% atau lebih}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja}} \times 100\%$	Bidang Litbang, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Bidang PPW, Bidang Data dan Informasi dan Sekretariat Bappeda dan Litbang	Bappeda dan Litbang
		Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbang	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan	$\frac{\text{Jumlah inovasi daerah yang telah diimplementasikan}}{\text{Jumlah inovasi daerah}} \times 100\%$	Bidang Litbang	Bappeda dan Litbang
			Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	$\frac{\text{Jumlah kajian yang digunakan}}{\text{Jumlah kajian}} \times 100\%$	Bidang Litbang	Bappeda dan Litbang



Tujuan sebagaimana tersebut diatas diharapkan menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, serta selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi.



Bagan 4.1
Pohon Kinerja





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya merealisasikan visi, tujuan dan sasaran sesuai dengan misi yang dicanangkan dalam pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan. Berkenaan dengan strategi, arah kebijakan daerah Kabupaten Malinau periode RPJMD tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih

peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Penjabaran strategi dan kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran renstra Bappeda dan Litbang dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas inovasi daerah.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Bappeda dan Litbang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Bappeda dan Litbang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Bappeda dan Litbang.

**Tabel 5.1. (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL		
Misi	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026			
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan	Memantapkan perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis kinerja
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Renstra Bappeda dan Litbang 2021-2026			
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas verifikasi dokumen perencanaan PD
			Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan data perencanaan
		Meningkatkan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi program pembangunan
	Meningkatnya fungsi penyelenggaraan kelitbangan	Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan inovasi daerah
		Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan	Meningkatkan jumlah pelaksanaan penelitian dan pengembangan



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok.

1. Program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran renstra Bappeda dan Litbang.
2. Program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran, namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran renstra Bappeda dan Litbang.
3. Program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Bappeda dan Litbang sehari-hari seluruh bidang dan sekretariat, yang tercantum pada **lampiran 6.1**.



Tabel 6.1. (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Malinau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Bappeda dan Litbang	100%	9.857.592.997	100%	10.532.132.709	100%	10.482.132.709	100%	10.482.132.709	100%	10.482.132.709	100%	10.482.132.709	100%	52.410.663.545	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	8.831.738.497	100%	9.488.299.909	100%	9.488.299.909	100%	9.488.299.909	100%	9.488.299.909	100%	9.488.299.909	100%	47.441.499.545	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	57 orang	8.831.738.497	54 orang	9.488.299.909	54 orang	9.488.299.909	54 orang	9.488.299.909	54 orang	9.488.299.909	54 orang	9.488.299.909	270 orang	47.441.499.545	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	107.885.300	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	56 orang	107.885.300	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	699.609.300	100%	774.609.300	100%	774.609.300	100%	774.609.300	100%	774.609.300	100%	724.609.300	100%	3.823.046.500	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis	99.726.000	4 jenis	99.726.000	4 jenis	99.726.000	4 jenis	99.726.000	4 jenis	99.726.000	4 jenis	99.726.000	20 jenis	498.630.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1507 kotak	49.991.700	1507 kotak	49.991.700	1507 kotak	49.991.700	1507 kotak	49.991.700	1507 kotak	49.991.700	1507 kotak	49.991.700	7535 kotak	249.958.500	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	2 jenis	49.962.000	2 jenis	49.962.000	2 jenis	49.962.000	2 jenis	49.962.000	2 jenis	49.962.000	2 jenis	49.962.000	10 jenis	249.810.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah partisipasi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 kali	499.929.600	50 kali	499.929.600	50 kali	499.929.600	50 kali	499.929.600	50 kali	499.929.600	50 kali	449.929.600	250 kali	2.449.648.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi sistem pemerintahan yang dapat digunakan	-	-	4 aplikasi	75.000.000	4 aplikasi	75.000.000	4 aplikasi	75.000.000	4 aplikasi	75.000.000	4 aplikasi	75.000.000	4 aplikasi	375.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	119.223.500	100%	119.223.500	100%	119.223.500	100%	119.223.500	100%	119.223.500	100%	119.223.500	100%	596.117.500	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	3 jenis	19.932.000	3 jenis	19.932.000	3 jenis	19.932.000	3 jenis	19.932.000	3 jenis	19.932.000	3 jenis	19.932.000	15 jenis	99.660.000	Bappeda dan Litbang	Malinau



Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Target	Rp	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	41 jenis	99.291.500	41 jenis	99.291.500	41 jenis	99.291.500	41 jenis	99.291.500	41 jenis	99.291.500	41 jenis	99.291.500	205 jenis	496.457.500	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	99.136.400	100%	150.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	550.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang pemeliharaan dan pajak kendaraan dibayarkan	6 unit	99.136.400	6 unit	150.000.000	6 unit	100.000.000	6 unit	100.000.000	6 unit	100.000.000	6 unit	100.000.000	6 unit	550.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGEANDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah	100%	2.183.172.680	100%	1.535.094.500	100%	1.432.184.500	100%	1.432.184.500	100%	1.432.184.500	100%	1.560.789.503	100%	7.392.437.503	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.02.2.0 1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rata-rata capaian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan	100%	1.583.985.755	100%	1.032.184.500	100%	1.032.184.500	100%	1.032.184.500	100%	1.032.184.500	100%	1.032.184.500	100%	5.160.922.500	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.02.2.0 1.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah partisipan yang hadir dalam konsultasi publik	350 orang	111.428.900	350 orang	80.000.000	350 orang	48.425.000	350 orang	48.425.000	350 orang	48.425.000	350 orang	48.425.000	1750 orang	273.700.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.02.2.0 1.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah perangkat daerah yang hadir dalam forum	44 OPD	175.397.500	44 OPD	102.794.200	44 OPD	75.485.000	44 OPD	75.485.000	44 OPD	75.485.000	44 OPD	75.485.000	220 OPD	404.734.200	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.02.2.0 1.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah partisipan yang hadir dalam musrenbang	800 orang	299.996.680	400 orang	252.447.000	400 orang	574.986.000	400 orang	574.986.000	400 orang	574.986.000	400 orang	574.986.000	2000 orang	2.552.391.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.02.2.0 1.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perkada	2 dok	997.162.675	2 dok	290.000.000	2 dok	333.288.500	2 dok	333.288.500	2 dok	333.288.500	2 dok	333.288.500	10 dok	1.623.154.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.02.2.0 2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	299.679.675	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	1.050.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.02.2.0 2.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku LKPI Bupati Malinau akhir masa jabatan	50 buku	99.977.775	-	0	-	0	-	0	-	0	50 buku	50.000.000	50 buku	50.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau



Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Target	Rp	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5.01.02.2.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah buku LKPJ Bupati Malinau Tahun 2022	50 buku	99.885.375	50 buku	75.000.000	50 buku	100.000.000	50 buku	100.000.000	50 buku	100.000.000	50 buku	100.000.000	250 buku	475.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.02.2.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil daerah	20 buku	99.816.525	20 buku	100.000.000	20 buku	100.000.000	20 buku	100.000.000	20 buku	100.000.000	20 buku	100.000.000	100 buku	500.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	299.507.250	100%	302.910.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	278.605.003	100%	1.181.515.003	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan evaluasi Renstra dan RPJMD 2021 s/d 2026	1 laporan	99.963.400	-	0		0		0		0	1 laporan	78.605.003	1 laporan	78.605.003	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan monitoring evaluasi dana DAK, Bantuan Keuangan, TP dan Tepra	12 laporan	99.979.350	12 laporan	50.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	60 laporan	450.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi terhadap hasil RENJA perangkat daerah	12 laporan	99.564.500	12 laporan	50.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	60 laporan	450.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100%	719.997.620	100%	769.997.900	100%	749.999.205	100%	749.999.205	100%	749.999.205	100%	749.999.205	100%	3.769.994.720	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	719.997.620	100%	769.997.900	100%	749.999.205	100%	749.999.205	100%	749.999.205	100%	749.999.205	100%	3.769.994.720	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	19 kali	199.999.720	19 kali	150.000.000	19 kali	150.000.000	19 kali	150.000.000	19 kali	150.000.000	19 kali	150.000.000	95 kali	750.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang pemerintahan	34 dok	99.999.405	34 dok	40.000.000	34 dok	100.000.000	34 dok	100.000.000	34 dok	100.000.000	34 dok	100.000.000	170 dok	440.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau



Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Target	Rp	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5.01.03.2.0.1.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah data pendukung pelaporan pelaksanaan dokumen APBDes	-	-	7 Kecamatan	100.000.000	7 Kecamatan	100.000.000	7 Kecamatan	100.000.000	7 Kecamatan	100.000.000	7 Kecamatan	100.000.000	35 Kecamatan	500.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.03.2.0.1.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1 laporan	149.999.645	1 laporan	149.999.645	1 laporan	149.999.645	1 laporan	149.999.645	1 laporan	149.999.645	1 laporan	149.999.645	5 laporan	749.998.225	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.03.2.0.1.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang pembangunan manusia	8 dok	49.999.290	8 dok	20.000.000	8 dok	30.000.000	8 dok	30.000.000	8 dok	30.000.000	8 dok	30.000.000	40 dok	140.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.03.2.0.1.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen data dan informasi integrasi intervensi pencegahan stunting	1 dok	219.999.560	1 dok	50.000.000	1 dok	219.999.560	1 dok	219.999.560	1 dok	219.999.560	1 dok	219.999.560	5 dok	929.998.240	Bappeda dan Litbang	Malinau
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100%	444.784.200	100%	330.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	280.000.000	100%	1.300.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.03.2.0.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	444.784.200	100%	330.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	280.000.000	100%	1.300.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.03.2.0.2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang ekonomi	20 kali	199.591.250	20 kali	150.000.000	20 kali	100.000.000	20 kali	100.000.000	20 kali	100.000.000	20 kali	150.000.000	100 kali	600.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.03.2.0.2.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang perekonomian	8 dok	49.978.500	8 dok	30.000.000	8 dok	30.000.000	8 dok	30.000.000	8 dok	30.000.000	8 dok	30.000.000	40 dok	150.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.03.2.0.2.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring	1 dok	195.214.450	1 dok	150.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	5 dok	550.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau



Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Target	Rp	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian																
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah	100%	699.360.388	100%	1.625.000.000	100%	325.000.000	100%	325.000.000	100%	325.000.000	100%	375.000.000	100%	2.975.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	699.360.388	100%	1.625.000.000	100%	325.000.000	100%	325.000.000	100%	325.000.000	100%	375.000.000	100%	2.975.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
1		5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan review Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Malinau	-	0	5 dok	350.000.000		0		0		0		0	5 dok	350.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
2		5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang infrastruktur	6 dok	49.978.500	6 dok	20.000.000	6 dok	30.000.000	6 dok	30.000.000	6 dok	30.000.000	6 dok	30.000.000	30 dok	140.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
3		5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	-	0	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	5 dok	500.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
4		5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan koordinasi fasilitasi pokja KPSPAM	-	0	1 laporan	100.000.000		0		0		0		0	1 laporan	100.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
5		5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	1 dok	399.933.000	25 kali	40.000.000		0		0		0		0	25 kali	40.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
6		5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen masterplan kawasan perbatasan	-	0	5 dok	800.000.000		0		0		0		0	5 dok	800.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau



Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Target	Rp	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			(RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
	7	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang kewilayahan	-	0	11 dok	45.000.000	11 dok	45.000.000	11 dok	45.000.000	11 dok	45.000.000	11 dok	45.000.000	55 dok	225.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
	8	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	-	0	1 dok	100.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	100.000.000	5 dok	350.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
	9	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	25 kali	249.448.888	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	5 laporan	500.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan fungsi penyelenggaraan kelitbang daerah	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian yang diimplementasikan dalam Perencanaan Pembangunan		299.834.590	80%	1.250.000.000	85%	268.983.495	90%	268.983.495	95%	268.983.495	100%	211.773.489	100%	2.268.723.974	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	-	0	100%	400.000.000	100%	118.983.495	100%	118.983.495	100%	118.983.495	100%	111.773.489	100%	868.723.974	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-	0	1 lap	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	300.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	-	0	1 lap	100.000.000	1 lap	118.983.495	1 dok	118.983.495	1 dok	118.983.495	1 dok	111.773.489	5 dok	568.723.974	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100%	199.869.450	100%	850.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	850.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen study pengembangan potensi jajanan kuliner/batik daerah	-	0	1 dok	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	150.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen study pengembangan potensi ikan air tawar	1 dok	199.869.450	1 dok	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	350.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau



Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5.05.02.2.0 3.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen study pengembangan potensi tanaman nenas dan jeruk	-	0	1 dok	350.000.000		0		0		0		0	1 dok	350.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	100%	99.965.140	-	0	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	100.000.000	100%	550.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau
		5.05.02.2.0 4.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang dilakukan diseminasi	1 tema	99.965.140	-	0	1 tema	150.000.000	1 tema	150.000.000	1 tema	150.000.000	1 tema	100.000.000	5 tema	550.000.000	Bappeda dan Litbang	Malinau



BAB VII

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA DAN LITBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:



Tabel 7.1. (T-C.28)
Indikator kinerja Bappeda dan Litbang yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN							
	INDIKATOR TUJUAN:							
	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran (IKU):							
1	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPd tahun berkenaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase capaian program dalam RKPd tahun berkenaan		80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Persentase inovasi daerah yang telah diimplementasikan		80%	85%	90%	95%	100%	100%
4	Persentase hasil kajian (penelitian) yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah		80%	85%	90%	95%	100%	100%
	II INDIKATOR PROGRAM (IKK):							
1	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Bappeda dan		100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Litbang							
2	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah		80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah		80%	85%	90%	95%	100%	100%
4	Persentase Hasil Penelitian yang diimplementasikan dalam Perencanaan Pembangunan		80%	85%	90%	95%	100%	100%
III INDIKATOR KEGIATAN:								
1	Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		-	-	-	-	-	-
3	Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rata-rata capaian		100%	100%	100%	100%	100%	100%



Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							
5	Rata-rata capaian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Rata-rata capaian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Rata-rata capaian pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Rata-rata capaian pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%



Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	bidang pemerintahan dan pembangunan manusia							
10	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		100%	-	-	-	-	100%
14	Persentase Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (Lima) tahun, memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Bappeda dan Litbang juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra K/L dan Renstra Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau 2021-2026 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Bappeda dan Litbang ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.
2. Dengan ditetapkannya Renstra Bappeda dan Litbang ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang perencanaan untuk menjadikannya sebagai acuan



dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.

3. Renstra Bappeda dan Litbang ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2021-2026 dan sekaligus dijadikan sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Bappeda dan Litbang ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Pelaksanaan Renstra Bappeda dan Litbang ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda dan Litbang, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Renstra Bappeda dan Litbang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malinau.



Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

Harapan kami semoga Renstra Bappeda dan Litbang ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di berbagai bidang, yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Malinau, 09 Agustus 2022

Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau

Drs. Agustinus, M.AP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196670217 199312 001